

**IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PROGRAM BANGGA KENCANA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nadila Rizki Tri Rachmawati
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
nadilarizkitr@gmail.com

Supri Hartono
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
suprihartono@untag-sby.ac.id

Radjikan
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur merupakan salah satu wujud nyata *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Secara praktis dan teoritis implementasi *collaborative governance* dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai kata sukses sesuai dengan teori delapan indikator keberhasilan *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Edward DeSeve. Keberhasilan implementasi *collaborative governance* dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo juga dibuktikan dengan penurunan angka stunting yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, meski dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan demikian diharapkan para pemangku kepentingan dapat terus mengevaluasi program baik ini hingga di tahun-tahun berikutnya.

Kata Kunci: *implementasi, collaborative governance, stunting*

ABSTRACT

The implementation of the Bangga Kencana program in Sidoarjo Regency, East Java, represents a tangible example of collaborative governance aimed at accelerating the reduction of stunting rates in the region. This research adopts a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews and direct field observations. Both practically and theoretically, the implementation of

collaborative governance in the Bangga Kencana program in Sidoarjo Regency has achieved success, aligning with Edward DeSeve's eight indicators of successful collaborative governance. The success of this implementation is further evidenced by a significant decrease in stunting rates over the past five years. Despite this progress, there are still some aspects that require attention, and it is hoped that stakeholders will continue to evaluate and improve this commendable program in the years to come.

Keywords: *implementation, collaborative governance, stunting*

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu yang memiliki tingkat stunting yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, angka stunting di wilayah ini mencapai angka 8,8 persen atau 7.906 anak. Meskipun Angka ini menurun menjadi 8,3 persen atau 6.663 anak dari 80.429 yang diperiksa pada tahun 2021, masalah ini tetap memerlukan penanganan yang sangat serius. Diperlukan kontribusi dari berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat setempat dalam mengatasi isu stunting ini secara efektif (Radarsidoarjo.co.id, 2022).

Menurut laporan yang dilansir dari (Wartagres, 2023), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertekad untuk memprioritaskan penanganan pada kasus stunting ini. Hal ini terlihat melalui peluncuran sebuah program Konsolidasi Bangga Kencana dan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Program yang bertujuan untuk memastikan perhatian yang lebih pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.

Program Bangga Kencana ini melibatkan beberapa pihak yang diantaranya termasuk BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sidoarjo. Program ini juga diperkuat dengan kolaborasi dengan PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya. Media seperti Wartagres, TV One News, Radar Sidoarjo, dan Diskominfo Jawa Timur juga turut berkontribusi dalam publikasi serta dokumentasi. Terakhir, masyarakat Kabupaten Sidoarjo sendiri juga terlibat dalam program tersebut (TV One News, 2023).

Kolaborasi yang dimaksud disini adalah kerja sama antara berbagai pihak yang bersatu padu untuk mensukseskan program penanganan stunting. Dalam Ilmu Administrasi Publik, konsep ini dikenal sebagai *Collaborative Governance*. Menurut teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008). Kolaborasi adalah pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membuat keputusan bersama berdasarkan tujuan yang telah disepakati. Secara dasar, *Collaborative Governance* berusaha mengintegrasikan pemangku kepentingan swasta dan publik dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam perumusan sebuah keputusan berbasis konsensus (Ipan et al., 2021).

Program Bangga Kencana yang menerapkan konsep *Collaborative Governance* dengan memperkuat kolaborasi antara dinas, pihak swasta, masyarakat, dan media informasi bertujuan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pemaparan diatas perlunya dilakukan penelitian terkait implementasi *Collaborative Governance* dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo beserta faktor pendukung dan penghambat implementasi *Collaborative Governance* dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berfokus pada implementasi *Collaborative Governance* dan faktor pendukung serta penghambat kolaborasi dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keberhasilan *Collaborative Governance* dari G. Edward DeSeve dengan delapan indikator yang meliputi struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar stakeholder, kejelasan tata kelola, akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya.

Implementasi

Van Meter dan Van Horn, seperti yang dikutip dalam Solichin (2008:135), mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai suatu sasaran yang telah disepakati dalam keputusan kebijakan.

Paul Sabatier (1986), sebagaimana yang disebutkan dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:19), mengidentifikasi enam variabel utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Berbeda dengan Edward III, variabel-variabel tersebut meliputi:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan.
2. Dukungan teori yang kuat dalam perumusan kebijakan.
3. Dasar hukum yang jelas dalam proses implementasi, sehingga memastikan kepatuhan petugas serta kelompok sasaran.
4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
5. Dukungan dari para pemangku kepentingan.
6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, serta politik.

Collaborative Governance

Menurut (Ansell & Gash, 2008), tata kelola sebuah pemerintahan kolaboratif adalah jenis tata kelola dimana aktor-aktor publik dan swasta bekerja sama secara kolektif untuk menetapkan undang-undang dan aturan penyediaan barang publik. Konsep pemerintahan kolaboratif ini menekankan pada pentingnya sebuah proses serta kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghasilkan produk hukum, aturan serta kebijakan yang sesuai untuk kepentingan masyarakat. Dalam *collaborative governance*, keberhasilan dan kegagalan dapat diukur melalui berbagai kriteria. Menurut G. Edward DeSeve dalam jurnalnya *Integration and Innovation in the Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment*,

Managed Networks, and Social networks (2009), terdapat delapan item penting dalam mengukur keberhasilan *collaborative governance*:

1. Struktur Jaringan (*Networked Structure*)

Struktur jaringan ini menjelaskan deskripsi konseptual keyerkaitan antar elemen yang bersama – sama mencerminkan unsur fisik dari jaringan yang dikelola. Dalam *collaborative governance*, jaringan tidak boleh memiliki hierarki kekuasaan, akan tetapi harus bersifat organis tanpa adanya dominasi, monopoli, sehingga setiap pemangku kepentingan memiliki kesetaraan dalam hak, kewajiban, tanggung jawab, orotitas, serta kesempatan dalam mencapai tujuan bersama.

2. Komitmen Terhadap Tujuan (*Commitment to a Purpose*)

Alasan keberadaan sebuah struktur jaringan adalah untuk tercapainya sebuah tujuan positif secara kolektif. Komitmen ini bergantung pada kepercayaan antar pemangku kepentingan dan sulit sicipai apabila terdapat keraguan dalam prosesnya. Komitmen harus diarahkan pada kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

3. Kepercayaan Antar Pemangku Kekuasaan (*Trust among the Participant*)

Kepercayaan antar pemangku kepentingan didasarkan kepada hubungan profesional atau social serta merupakan keyakinan bahwa partisipasi dalam jaringan ditujukan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pemangku kepentingan diharuskan saling mempercayai sebagai bentuk hubungan professional guna mencapai keberhasilan *collaborative governance*.

4. Kejelasan Dalam Tata Kelola (*Governance Commit to User*)

Program kolaborasi wajib menekankan kejelasan tata kelola yang mencakup aturan main dan transparansi yang disepakati bersama oleh semua pemangku kepentingan. Kejelasan mengenai siapa yang berhak menjalankan dan siapa yang tidak, sangat penting untuk kesuksesan kolaborasi.

5. Akses Terhadap Kekuasaan (*Access to Authority*)

Tersedianya standar serta prosedur yang jelas serta diterima secara luas. Aturan kewenangan hours jelas dan diterima oleh semua pemangku kepentingan dalam menjalankan peran masing – masing.

6. Pembagian Tanggungjawab dan Akuntabilitas (*Distributive Accountability / Responsibility*)

Tanggung jawab dalam sebuah tata kelola harus dibagi secara jelas diantara semua pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat yang wajib terlibat dalam pembuatan dan pengambilan sebuah keputusan kebijakan.

7. Berbagi Informasi (*Information Sharing*)

Kemudahan mengakses informasi bagi para anggota dengan perlindungan privasi serta pembatasan akses bagi non-anggota. Dalam *collaborative governance*, system dan prosedur informasi harus mudah diakses serta aman untuk semua pemangku kepentingan.

8. Akses terhadap Sumber Daya (*Access to Resources*)

Tersedianya sumber daya keuangan, teknis, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan. Sumber daya harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan terkait.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini ada pada bagaimana implementasi *collaborative governance* dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada implementasi *Collaborative Governance* yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program tersebut dengan menggunakan delapan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* menurut Edward DeSeve. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi langsung dengan empat pemangku kepentingan diantaranya dari pihak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dan PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya serta sepuluh orang tua balita terverifikasi stunting di Kabupaten Sidoarjo.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Bangga Kencana sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

1. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

Berdasarkan indikator keberhasilan *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh DeSeve (2009), jaringan yang terbentuk dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif tidak boleh bersifat hierarkis, jaringan tersebut haruslah bersifat organis, adil, dan setara sehingga memudahkan proses pertukaran ide dan gagasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Keempat elemen yang tergabung dalam pelaksanaan program Bangga kencana di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dan PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya serta tidak luput masyarakat khususnya dalam penelitian ini ialah orang tua balita terverifikasi stunting di Kabupaten Sidoarjo. Memiliki tujuan yang sama yakni menciptakan keluarga yang berkualitas dengan mempercepat laju penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan dalam kondisi di lapangan, hingga saat ini tercatat dari sebanyak 146.769 balita di Kabupaten Sidoarjo masih ada 4.684 balita terverifikasi stunting, angka tersebut menunjukkan bahwa prevalensi kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo ada di angka 3.2%.

Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Terverifikasi Stunting	Prevalensi (%)
2020	89.717	7.906	8.8%
2021	80.429	6.663	8.3%
2022	73.194	4.797	6.6%
2023	93.307	4.955	5.3%
2024	146.769	4.684	3.2%

Tabel 1 Presentase Balita Terverifikasi Stunting

Berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo, pada prakteknya program Bangga Kencana ini memiliki banyak serangkaian program di dalamnya sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi dan koordinasi dengan banyak pihak. Secara alami, DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan TP PKK Kabupaten Sidoarjo memiliki jaringan yang terstruktur dimana ketika pihak tersebut tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sidoarjo dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Beda halnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan pihak CSR PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya yang membentuk jaringan sesuai kebutuhan, hak dan kewajiban yang diatur dalam MOU dalam rangka turut membantu percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Seluruh pihak yang berkolaborasi dalam program Bangga Kencana dalam upaya mempercepat laju penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki tujuan yang sama dan disepakati serta disertai dengan tanggungjawab dan wewenang penuh untuk dapat saling memenuhi tugas dengan baik. Namun, dalam konteks *Networked Structure* menurut DeSeve, masih ada satu hal yang menyebabkan struktur jaringan yang mengaitkan keempat elemen dalam program Bangga Kencana ini belum efektif sepenuhnya. Hal tersebut ada pada, pihak CSR PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya hanay membentuk jaringan MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, meskipun hal tersebut diketahui pula oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dan TP PKK Kabupaten Sidoarjo, namun MOU dua pihak tersebut menjelaskan bahwasanya tidak adanya jaringan struktur yang menyambungkan langsung pihak CSR PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya dengan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dan TP PKK Kabupaten Sidoarjo.

2. *Commitment to a Common Purpose (Komitmen terhadap Tujuan)*

Sebuah *networked* atau jaringan harus ada karena salah satunya guna memastikan bahwa ada komitmen yang perlu dijaga dalam rangka mencapai tujuan positif bersama (DeSeve, 2009). Kolaborasi dapat berjalan lancar salah satunya berkat komitmen yang terus dijaga oleh seluruh pihak atau stakeholder yang tergabung dengan maksud dan tujuan mencapai kesuksesan program bersama. Eksisnya komitmen terhadap tujuan yang jelas mengharuskan seluruh pihak terkait untuk memahami tujuan yang ingin dicapai bersama melalui kolaborasi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama para narasumber, terbukti adanya komitmen yang sama yakni untuk mewujudkan Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Teori DeSeve terkait *Commitment to a Common Purpose* dengan berdasarkan data hasil wawancara yang peneliti lakukan dan jelaskan adalah komitmen terhadap tujuan yang diinginkan telah tercapai dan selaras. Ini terbukti di setiap stakeholders yang berkolaborasi memiliki tujuan yang berbeda namun output yang sama yakni menekan laju percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, dan para pemangku kepentingan terkait dapat melakukan kolaborasi dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut.

3. *Trust among the Participants (Kepercayaan antar Stakeholder)*

Kepercayaan antar stakeholder meliputi rasa saling percaya atas informasi-informasi dan usaha-usaha yang disampaikan oleh masing-masing stakeholder yang sedang melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya dalam suatu jaringan kolaborasi guna mencapai tujuan bersama dan keberhasilan kolaborasi pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, baik antar pemangku kepentingan yang tergabung dan berkolaborasi bersama dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo melalui TPPS dan pihak CSR PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya juga masyarakat telah sama-sama menaruh rasa saling percaya satu sama lain dalam proses kolaborasi yang kuat ini. Baik DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dan PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya saling percaya bahwa baik satu sama lain akan melangsungkan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Hasil wawancara dengan stakeholders yang terkait dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo ini semuanya menyebutkan bahwa saling menaruh kepercayaan karena seluruh pihak yang terkait juga terikat oleh aturan yang tertulis dan dipahami seluruh pihak yang berkolaborasi. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa indikator *trust among the participants* dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo sudah terpenuhi dan seluruh pihak termasuk masyarakat menjalin kepercayaan yang baik dalam proses tata kelola pemerintahan kolaboratif.

4. *Governance Commit to User (Kejelasan dalam tata kelola)*

Dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif, kolaborasi dapat dikatakan berhasil salah satunya apabila di dalam jaringan tersebut terdapat kejelasan atas aturan dan cara kerja yang disepakati bersama oleh masing-masing stakeholder yang saling berkaitan. Di mana tanpa adanya kejelasan aturan ataupun tata kelola yang ada tentu saja sistem kolaborasi yang ingin dibentuk tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Maka dari itu aspek kejelasan aturan atau tata kelola ini harus dapat dipikirkan baik-baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Dalam konteks tata kelola, kejelasan berarti pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses, prosedur, dan aturan yang ada dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah yang berkomitmen pada pengguna (user) biasanya berfokus pada pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwasanya program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Sidoarjo bahwa dari hasil beberapa wawancara dengan narasumber yang berkaitan dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme dan sasaran dalam program sudah ditetapkan dengan jelas. Di mana sasaran dalam program Bangga Kencana ini yang ditetapkan adalah seluruh masyarakat dari usia yang masih remaja, dewasa, hingga lansia (lanjut usia). Tentu saja dalam menentukan sasaran ini disesuaikan dengan tujuan program dan juga hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana.

Selain itu juga, dari informasi narasumber juga terdapat pernyataan lain bahwasanya kejelasan cara kerja ataupun aturan sudah sesuai dengan kesepakatan

yang dibuat. Terlihat mereka bertugas mengacu pada SK TPPS Kabupaten Sidoarjo yang diatur dalam Perbup No. 22 Tahun 2022. Kemudian mereka yang tergabung dalam SK tersebut bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pengarah dan Wakil Bupati sebagai ketua TPPS Kabupaten Sidoarjo dengan sebaik-baiknya. Adapun pihak-pihak yang tergabung itu sendiri seperti DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dan PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya.

5. ***Access to Authority (Akses terhadap Kekuasaan)***

Access to Authority atau "Akses terhadap Kekuasaan" mengarah pada kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh pengaruh atau kontrol dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan kekuasaan, baik itu dalam konteks pemerintahan, organisasi, atau masyarakat secara umum. Akses ini berkaitan dengan siapa yang dapat mempengaruhi kebijakan, aturan, atau keputusan penting, serta bagaimana akses tersebut dapat diperoleh dan digunakan.

Dalam hal ini, pihak-pihak terkait dalam program Bangga Kencana yang berada di Kabupaten Sidoarjo ini seperti pihak-pihak yang tergabung itu sendiri seperti DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dan PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya harus bisa mengontrol diri sebelum bisa menentukan kebijakan atau aturan yang akan diterapkan. Terlebih dengan akses kekuasaan, masing-masing stakeholder sudah punya kewenangan masing-masing dan masing-masing stakeholder harus bisa menghargai hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa temuan terkait akan akses terhadap kekuasaan. Pertama, berkaitan dengan pembagian kewenangan ataupun tupoksi. Dalam hal ini, masing-masing stakeholder yang tergabung dalam program Bangga Kencana ini memiliki kewenangan ataupun tupoksinya masing-masing. Sehingga, antara pihak satu dan pihak lainnya tidak sembarang untuk memutuskan sesuatu ataupun mengerjakan sesuatu di luar dari kewenangan ataupun tugasnya. Salah satu contohnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak kedua memiliki fungsi penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan serta mempunyai kompetensi dan/atau kemampuan dalam hal program, sarana dan prasarana untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan keliling.

Kedua, terkait dengan aturan yang melandasi pembagian kewenangan ataupun tupoksi dalam program ini. Dalam hal ini, tentu saja pembagian kewenangan ataupun tupoksi tidak serta merta diberikan begitu saja tanpa melihat keahlian ataupun ranah pekerjaan dari masing-masing stakeholder yang ada. Di mana sebelum menentukan pembagian kewenangan atau tupoksi ini, masing-masing stakeholder harus memahami dan menyetujui MOU ataupun aturan yang ada.

Dalam hal ini, ada beberapa aturan ataupun landasan adanya pembagian kewenangan atau tupoksi program Bangun Kencana ini yaitu di antaranya adalah SK TPPS yang ditandatangani oleh Bupati. Namun, karena program ini juga ada kaitannya dengan pihak swasta maka ada MOU lain yang harus disepakati terkait akses kekuasaan atau pembagian tupoksi ini. Lalu, berdasarkan hasil temuan

penelitian ini juga ditemukan adanya perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tentang pelayanan kesehatan keliling antara kantor cabang PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama milik PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya dengan Nomor SP.GM.SUB.27/HK.04.01/2023 dan milik Dinas Kesehatan dengan Nomor 415.4/4488/438.5.2/2023. Perjanjian kerjasama tersebut disepakati bersama dengan duduk bersama dengan mendatangkan Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah.

6. *Distributive Accountability/Responsibility (Pembagian akuntabilitas dan tanggungjawab)*

Distributive Accountability atau Responsibility mengarah pada konsep pembagian tanggung jawab dalam suatu kelompok atau organisasi, di mana setiap individu atau entitas mempunyai bagian dari tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya ditempatkan pada satu individu atau pihak, tetapi dibagi di antara berbagai pihak sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing (Rivelino & Ginting, 2020).

Dalam hal ini sebenarnya konsepnya agak sedikit mirip dengan konsep yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya yaitu akses kekuasaan. Di mana dalam hal ini, pembahasannya mengarah pada pembagian kerja ataupun tanggungjawab dari masing-masing stakeholder yang terlibat dalam suatu program yang sedang berjalan. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat hal yang berkaitan dengan hal ini. Jika merujuk pada hasil wawancara dijelaskan bahwasanya pihak-pihak yang tergabung itu sendiri seperti DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dan PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya sudah memiliki tugas pokok dan fungsi atau kewajibannya masing-masing.

Adapun tupoksi ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh para stakeholder ini adalah seperti misalnya DP3AKB Kabupaten Sidoarjo mereka melaksanakan intervensi spesifik dimana mereka berperan dalam pencegahan pernikahan usia dini dan penguatan pola perilaku sasaran keluarga beresiko stunting. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggungjawab untuk menangani isu spesifik dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian suplementasi, kegiatan peningkatan kemampuan tenaga ahli dan kader, kegiatan monitoring dan evaluasi, termasuk ada kegiatan Pos Gizi yang masuk dalam serangkaian program Bangsa Kencana.

7. *Information Sharing (Berbagi informasi)*

Berbagi informasi ialah proses pertukaran data, pengetahuan, atau materi antara individu, kelompok, atau organisasi untuk meningkatkan pemahaman, mendukung pengambilan keputusan, atau mencapai tujuan bersama. Berbagi informasi sangat penting dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari, bisnis ataupun pemerintahan tak terkecuali dalam pembentukan suatu program. Berbagi informasi menjadi hal yang penting antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu program yang sedang dibangun. Dalam hal ini, yang menjadi bahasan pada konsep ini ialah berbagi informasi dalam program Bangun Kencana dari masing-masing stakeholder yang terlibat.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang ditemukan oleh penulis, terdapat beberapa hal yang ditemukan. Pertama, dalam upaya para pihak yang terlibat dalam menyebarkan informasi seputar program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan beberapa hal, baik itu disebarikan secara daring (online) ataupun luring (offline) juga media cetak. Pemanfaatan media online yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program ini sangat beragam. Misalnya, DP3AKB mereka memanfaatkan media YouTube, Instagram, dan Website dari BKKBN untuk menyebarkan informasi yang dirasa perlu disampaikan demi berhasilnya program yang sedang dilaksanakan.

Kemudian, juga selain pemanfaatan media sosial ataupun website. Stakeholder lain juga sudah mengembangkan suatu aplikasi yang dapat memberikan layanan informasi terkait program yang sedang dilakukan. Adapun aplikasi yang dimaksud itu adalah EPPGBM. Hanya saja aplikasi tersebut belum bisa diakses oleh masyarakat, aplikasi tersebut hanya bisa diakses oleh para pemangku kepentingan saja.

Selain media online, pihak-pihak yang terlibat dalam program ini juga memanfaatkan media offline (luring) dalam menyebarkan informasi terkait dengan program yang sedang dilakukan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai macam sosialisasi ataupun penyuluhan. Hal ini, memang perlu dilakukan mengingat masyarakat biasanya lebih mudah mencerna informasi apabila diberikan secara langsung oleh mereka. Penyuluhan ataupun sosialisasi yang dilakukan biasanya juga dilakukan oleh para stakeholder demi menyukseskan program yang sedang berjalan.

Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan respon masyarakat akan adanya informasi yang telah dibagikan oleh stakeholder yang ada. Di mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwasanya informasi-informasi yang diberikan tersampaikan dengan baik di masyarakat. Terlebih bila ada bantuan-bantuan yang akan diberikan masyarakat informasi itu biasanya disebar melalui media online, masyarakat merasa terbantu apabila dengan segera mendapatkan informasi semacam itu.

8. *Access to Resources (Akses terhadap Sumber Daya)*

Akses terhadap sumber daya mengarah pada kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan dan menggunakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan mereka. Sumber daya ini bisa berupa material, finansial, sosial, pengetahuan, atau teknologi. Akses terhadap sumber daya sangat penting dalam berbagai konteks, baik itu dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, atau bahkan dalam pengembangan teknologi.

Dalam hal ini, akses sumber daya di sini dimaksudkan untuk keberhasilan kolaborasi pemerintah dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikatakan bahwasanya terkait dengan akses sumber daya bisa dikatakan sudah tercukupi seutuhnya baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya materil (seperti uang dan bahan penunjang lainnya). Seperti, Dinas Kesehatan misalnya mereka menyediakan sumber daya manusia dari OPD nya sendiri dan untuk sumber daya keuangan, kami Dinas Kesehatan memiliki anggaran tersendiri untuk program

percepatan penurunan stunting. Selain itu, juga mereka menyediakan bantuan langsung demi menjalankan program penurunan angka stunting di Sidoarjo.

Faktor Pendukung dan Penghambat pada Implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sidoarjo

Kasus stunting merupakan salah satu masalah di Indonesia yang hingga saat ini belum juga kunjung usai, di mana penyebarannya hampir merata di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pembahasan kali ini ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberlangsungan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. Adapun sebagai berikut penjelasannya.

1. Partisipasi aktif dari seluruh OPD yang tergabung

Dalam keberhasilan suatu program tentu saja salah satu faktor yang berpengaruh adalah adanya partisipasi aktif dari masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Selain partisipasi aktif dari masing-masing OPD, mereka juga memiliki pemahaman yang baik akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga dari hal tersebut memudahkan pembagian kerja dalam program dan tentu saja akan mempercepat segala urusan.

Terkadang dalam keberlangsungan program, tupoksi belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan. Namun, dalam program Bangga Kencana ini menurut pihak DP3AKB masing-masing OPD sudah memahami dengan baik tupoksinya masing-masing, terlebih mereka juga sudah mengerjakannya juga dengan sangat baik. Hal ini menjadi poin penting dalam keberhasilan program yang sudah dirancang oleh dadi masing-masing pihak stakeholder.

2. Pembagian kerja yang terstruktur dan harmonisasi antar OPD yang baik

Pembagian kerja merupakan hal yang paling penting dalam berjalannya suatu program. Karena bila saja terjadi pembagian kerja yang tidak merata, tentu saja program atau proyek sedang berjalan tidak akan berjalan dengan semestinya. Menurut Dinas Kesehatan Sidoarjo, adanya pembagian visi-misi dan penentuan sasaran memudahkan Dinas Kesehatan mengetahui fungsi tugasnya. Dengan begitu, masing-masing pemangku kepentingan sudah tau peran dan fungsinya masing-masing.

Kemudian terkait dengan hubungan antar OPD. Dinas Kesehatan sendiri membenarkan bahwasanya hubungan antar OPD berjalan sangat baik hal ini memudahkan dalam upaya komunikasi dan kerjasama didalamnya. Sehingga, dengan begitu harmonisasi akan tercipta dan tentu saja program dapat dijalankan dengan semestinya. Hal ini diperkuat juga dengan pihak swasta yaitu PT. Angkasa Pura I Juanda Surabaya yang mengatakan Dinas Kesehatan Sidoarjo dan puskesmas setempat berkerjasama dengan baik, hal ini memudahkan program CSR yang dibuat.

Dalam keberlangsungan suatu program tentu saja di dalam perjalanannya tidak bisa berjalan mulus tanpa adanya gangguan atau hambatan. Begitu pula dengan Collaborative Governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. Adapun sebagai berikut faktor penghambatnya.

3. Peraturan yang kurang tegas

Aturan sudah semestinya dapat diberlakukan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Apabila adanya aturan yang dibuat dirasa masih abu-abu atau kurang tegas, tentunya kedepannya akan mengundang suatu permasalahan. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengatakan aturan-aturan untuk beberapa program seperti khususnya program bantuan untuk balita stunting seperti susu formula, bahan makan mentah, dan suplementasi di lapangan itu kurang mengikat. Alhasil, hal tersebut menjadikan suatu hambatan bagi suksesnya program Bangga Kencana yang dibuat oleh pemerintah dan pihak swasta.

4. Bantuan salah sasaran

Adanya bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam penurunan angka stunting di Sidoarjo. Namun, dalam keberlangsungan program Bangga Kencana ini masih ditemukan indikasi terjadinya bantuan yang salah sasaran. Tentu saja hal ini sangat merugikan, dan bila tak dibenahi maka program yang sudah dirancang tidak akan berjalan dengan semestinya dan cenderung akan gagal. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bantuan masih bisa diakses oleh orang yang seharusnya tidak mengaksesnya, dan bantuan itu bisa juga belum tersampaikan kepada yang justru membutuhkan.

5. Kurangnya pembaharuan data di lapangan

Data merupakan hal yang penting sebagai rujukan program yang akan dilakukan. Apabila data-data yang diperlukan dirasa sudah terlalu lama ataupun bahkan tidak ada ini akan menyulitkan pemangku kepentingan dalam mengambil suatu kebijakan. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sendiri, data balita data imunisasi dari bidan desa maupun kader posyandu itu dirasa sangat lama updatenya, bahkan cenderung kurang up to date (terkini). Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, jika dibiarkan begitu saja terjadinya salah sasaran sangat dimungkinkan untuk terjadi.

6. Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi tidak hanya dibutuhkan dari pihak pemangku kepentingan atau pihak yang mengadakan suatu program akan tetap masyarakat juga harus berpartisipasi aktif juga demi suksesnya program yang sedang berjalan. Apabila masyarakat sendiri dinilai kurang berpartisipasi aktif, tentu saja akan menyulitkan berjalannya program yang akan dilakukan. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sendiri terkadang masyarakat dirasa enggan untuk mencari tau tentang masalah apa yang terjadi ataupun memikirkan solusi yang mestinya dilakukan. Terlebih ketika sudah diajak untuk mengikuti program Bangga Kencana ini masih ada masyarakat yang masih menolak untuk ikut.

7. Minimnya anggaran OPD setempat

Salah satu permasalahan atau hambatan yang cukup krusial ialah terkait dengan pengadaan anggaran. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwasanya terdapat kelurahan tidak memiliki anggaran untuk Rumah Desa Sehat (RDS) dan rembuk stunting, padahal kedua agenda itu masuk dalam serangkaian program Bangga Kencana. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah setempat untuk bisa memaksimalkan anggaran yang ada demi keberlangsungan program positif semacam ini.

E. KESIMPULAN

Program Bangga Kencana atau kependekan dari Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana merupakan program nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat yang memiliki fokus utama menciptakan keluarga berkualitas melalui generasi berencana. Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo merupakan hasil kolaborasi dari beberapa stakeholders. Berdasarkan bahasan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, terkait dengan implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Hasil yang ditemukan adalah jika dilihat dari konsep 8 (delapan) indikator pengukuran keberhasilan Collaborative Governance milik G. Edward DeSeve, secara keseluruhan program Bangga Kencana sudah memuat hampir semua dari delapan indikator tersebut. Dikatakan hampir dikarenakan dalam implementasi kolaborasi pemerintah dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi tujuh dari delapan indikator yang ada, hanya satu indikator yang belum terpenuhi dengan baik yakni indikator Networked Structure (Struktur jaringan). Adapun tujuh dari delapan indikator lain yang sudah terpenuhi dengan baik diantaranya adalah Commitment to a Common Purpose (Komitmen terhadap Tujuan), Trust among the Participants (Kepercayaan antar Stakeholder), Governance Commit to User (Kejelasan dalam tata kelola), Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan), Distributive Accountability/Responsibility (Pembagian tanggungjawab/ akuntabilitas), Information Sharing (Berbagi Informasi), dan Access to Resources (Akses terhadap Sumber Daya).

Kedua terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pada implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, adapun faktor pendukungnya adalah partisipasi aktif dari seluruh OPD yang tergabung dan pembagian kerja yang terstruktur serta harmonisasi antar OPD yang baik. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah peraturan yang kurang tegas, bantuan salah sasaran, kurangnya pembaharuan data di lapangan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya anggaran OPD setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja, 18*(3), 383–391.
- Radarsidoarjo.co.id. (2022). *Kolaborasi Penurunan Stunting Sidoarjo Untuk Capai Target Di Bawah 14 Persen*. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/85934136/kolaborasi-penurunan-stunting-sidoarjo-untuk-capai-target-di-bawah-14-persen>
- TV One News. (2023). *Kolaborasi BKKBN dan Pemkab Sidoarjo, Wabup Optimis Stunting Turun 14 Persen Tahun 2024*. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/127750-kolaborasi-bkkbn->

dan-pemkab-sidoarjo-wabup-optimis-stunting-turun-14-persen-tahun-2024

Wartagres. (2023). *Fokus Penurunan Stunting, Pemkab Sidoarjo Gelar Progam Konsolidasi Bangsa Kencana.*
<https://wartagres.com/2023/06/07/fokus-penurunan-stunting-pemkab-sidoarjo-gelar-progam-konsolidasi-bangsa-kencana/>